

DAMPAK KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP STABILITAS KAWASAN ASIA TENGGARA

Kevin Andreas Halomoan Tambunan¹, Ridha Nababan², Rimma Anisa Siagian³,
Roslin Naiborhu⁴, Sintia Harianti⁵, Prayetno⁶

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan

Alamat E-mail: ¹kevintambunan1945@gmail.com, ²ridhanababan68@gmail.com,

³rimmasiagian1906@gmail.com, ⁴roslinnaiborhu23@gmail.com,

⁵sintiaharianti05@gmail.com.

ABSTRACT

The conflict in the South China Sea involves overlapping claims between six countries, namely China, the Philippines, Taiwan, Brunei, Malaysia and Vietnam. The main cause of this conflict is the potential for abundant natural resources, including oil and gas, as well as strategic international trade routes. China claims almost the entire region through the decree line, sparking tensions and protests from other countries. The purpose of this paper is to examine the impact of the conflict in the South China Sea on stability in the Southeast Asia region. This research uses the literature study method. This type of method is collecting data by searching for sources and constructing them from various sources such as books, journals and research that has already been carried out. Literature study is an effort carried out by researchers to collect information that is relevant to the topic or problem that will be or is being researched. So, based on this research to determine the impact of this conflict on the stability of Southeast Asia includes increasing military tensions and economic challenges for the countries involved.

Keywords: South China Sea conflict, Stability, Southeast Asia

Abstrak

Konflik di Laut China Selatan melibatkan klaim tumpang tindih antara enam negara yaitu Tiongkok, Filipina, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Vietnam. Penyebab utama konflik ini adalah potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas, serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah ini melalui garis keputusan, yang memicu ketegangan dan protes dari negara-negara lain. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana dampak yang timbul akibat adanya konflik di laut China Selatan terhadap stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Adapun penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Jenis metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Studi kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Jadi, berdasarkan penelitian ini untuk mengetahui dampak konflik ini terhadap stabilitas Asia Tenggara mencakup meningkatnya ketegangan militer dan tantangan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat.

Kata Kunci: Dampak konflik Laut China Selatan, Stabilitas, Asia Tenggara

A. PENDAHULUAN

Laut China Selatan (LCS) terletak di Pasifik Barat, sebagian besar di antara negara-negara Asia Tenggara. Karena luasnya yang sekitar 3,5 juta kilometer persegi, wilayah ini disebut sebagai laut "setengah tertutup". Selama bertahun-tahun, konflik di Laut Cina Selatan telah berkembang menjadi masalah penting yang dapat mempengaruhi stabilitas wilayah Asia Tenggara. Dengan kekayaan sumber daya alam seperti cadangan minyak dan gas, serta jalur pelayaran internasional yang menjadi jalur perdagangan utama dunia, konflik Laut Cina Selatan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas Asia Tenggara. Namun, konflik di Laut Cina Selatan melibatkan klaim teritorial di sejumlah negara, termasuk Cina Filipina. Ketegangan yang terus meningkat karena klaim teritorial antara negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Filipina berpotensi memicu konflik bersenjata dan mengganggu jalur perdagangan internasional yang penting. Selain efek militer, konflik ini berdampak pada stabilitas Kawasan di Asia Tenggara seperti dalam keamanan ekonomi dan lingkungan, sehingga negara-negara di sekitar harus meningkatkan anggaran

perlindungan mereka dan bekerja lebih erat untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan mereka.

Laut China Selatan telah menjadi kawasan yang memiliki banyak peluang konflik dalam beberapa tahun terakhir. Potensi konflik ini mempengaruhi stabilitas dan keamanan negara-negara di sekitarnya, terutama negara-negara di Asia Tenggara, serta kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan. Hampir seluruh negara di pinggiran Pasifik Barat memiliki kepentingan yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan keamanan Laut Cina Selatan, karena merupakan jalur laut yang penting untuk navigasi internasional dan tempat perlintasan yang sangat ramai. Situasi ini semakin memburuk karena konflik yang berlarut-larut terkait penyelesaian teritorial di Laut China Selatan. Sejumlah negara, seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, memiliki klaim atas bagian laut yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas. Klaim ini melibatkan pulau-pulau kecil, terumbu karang, serta jalur laut yang sangat strategis yang menghubungkan banyak perekonomian besar di dunia. Laut China Selatan memiliki banyak jalur pelayaran internasional,

menjadikannya salah satu rute perdagangan terpenting di dunia. Lebih dari keseluruhan perdagangan global melintasi wilayah ini setiap tahun.

Sengketa yang berlangsung lama ini dapat berdampak pada banyak negara di luar wilayah tersebut, bukan hanya negara-negara yang terlibat langsung. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia sangat menginginkan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Mereka juga menyadari pentingnya wilayah ini bagi perekonomian dan keamanan internasional. Selain itu, eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan dapat menyebabkan lebih banyak ketegangan di seluruh Asia Pasifik. Hal ini dapat berdampak pada hubungan antarnegara dan keseimbangan geopolitik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Laut Cina Selatan tidak hanya merupakan masalah geopolitik di Asia Tenggara tetapi juga merupakan masalah global yang mempengaruhi diplomasi global. Keamanan dan stabilitas di wilayah ini sangat penting untuk stabilitas perdagangan internasional, perlindungan sumber daya alam, dan pencegahan konflik yang lebih besar di masa depan.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Laut Cina Selatan

tetap berada di jalur yang aman dan bebas dari ketegangan yang merugikan semua pihak, negara-negara yang terlibat harus berusaha mencari solusi damai dan menggunakan diplomasi. Berdasarkan latar belakang ini maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana dampak yang timbul akibat adanya konflik di laut China Selatan terhadap stabilitas dikawasan asia Tenggara.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Studi kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik di Laut China Selatan

Setelah Perang Dunia II, konflik di Laut China Selatan bermula dari konflik antara negara-negara yang mengklaim wilayah tersebut, terutama antara Jepang dan negara-negara Asia Tenggara serta Tiongkok. Jepang memperluas wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Laut Cina Selatan, yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan jalur perdagangan strategis, sebelum dan selama Perang Dunia II. Menduduki wilayah ini untuk memperkuat kendali atas sumber daya alam, seperti karet dan minyak, yang sangat penting bagi perang. Pada saat Perang Dunia Kedua hampir berakhir, Jepang melepaskan kendali atas tanah yang mereka miliki, termasuk sejumlah pulau di Laut Pasifik Cina Selatan.

Setelah kekalahan Jepang, wilayah tersebut, seperti Pulau Paracel dan Spratly, menjadi topik yang membahas antara beberapa negara, salah satunya adalah Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Tiongkok, menurut dakwaan historis mereka, mulai menyatakan hampir sebagian besar Laut Cina Selatan dengan garis yang memiliki sembilan titik (baris dengan sembilan garis putus-

putus), yang mencakup sebagian besar wilayah. Jepang menyerang banyak negara Asia pada tahun 1941, termasuk Tiongkok, Indochina (sekarang Vietnam, Laos, dan Kamboja), dan sebagian dari wilayah yang sekarang menjadi negara-negara seperti Malaysia dan Filipina, yang juga memiliki klaim atas Laut China Selatan. Selama pendudukan, wilayah-wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan Jepang dan pasukan sekutu, termasuk Amerika Serikat, yang terlibat dalam beberapa operasi militer di Lancang-Lancang. Selain itu, ketegangan meningkat antara kekuatan kolonial, seperti Inggris dan Prancis, yang menguasai sebagian wilayah Asia Tenggara setelah Perang Dunia II berakhir. Banyak negara di Asia Tenggara mulai berjuang untuk kemerdekaan dan mempertahankan wilayah di Laut Cina Selatan, terutama karena sumber daya alam yang melimpah. Hal ini berdampak pada hubungan internal.

Konflik di Laut Cina Selatan meningkat pada tahun 1970-an sebagai akibat dari klaim teritorial yang tumpang tindih antara beberapa negara di wilayah tersebut, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Laut ini memiliki nilai strategis yang

signifikan karena potensi sumber daya alamnya, seperti minyak dan gas, dan karena perannya sebagai jalur transportasi internasional. Pada tahun 1970-an, situasi di Laut Cina Selatan mencerminkan pertarungan geopolitik yang melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan militer. Situasi ini terus berkembang hingga saat ini, menyebabkan ketegangan yang lebih besar antara negara-negara yang berpartisipasi di wilayah tersebut. Klaim ini menjadi dasar konflik. Selama tahun 1970 - an, konflik meningkat akibat eksploitasi sumber daya alam Laut Cina Selatan, terutama gas dan minyak. Setelah pertempuran sengit di Kepulauan Paracel pada tahun 1974, Tiongkok mengambil alih kepulauan tersebut dari pasukan Vietnam Selatan. Konflik ini menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang mengklaim wilayah tersebut, termasuk Vietnam Utara yang mendukung klaim Vietnam Selatan dan Filipina yang merasa bahwa ekspansi Tiongkok akan mengancam mereka. Selain itu, ketegangan meningkat akibat eksplorasi sumber daya gas dan minyak di wilayah tersebut pada tahun 1970-an.

Negara-negara di Laut Cina Selatan bersaing untuk memanfaatkan

potensi ekonomi yang besar. Ketegangan diplomasi masih ada selama sepuluh tahun ini, meskipun tidak ada pertempuran besar lainnya. Tiongkok terus mempertahankan klaimnya atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, sementara negara-negara yang lebih kecil, seperti Vietnam dan Filipina, berusaha memperkuat posisi mereka dengan dukungan dari kekuatan internasional. Ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat pada tahun 1990-an saat negara-negara yang mengklaim wilayah tersebut membangun militer dan infrastruktur. Tiongkok mulai membangun instalasi militer di sejumlah pulau dan atol yang mereka miliki. China menduduki Mischief Reef di Kepulauan Spratly pada tahun 1995, yang sebelumnya diklaim oleh Filipina. Filipina dan negara-negara di sekitarnya melakukan protes terhadap tindakan ini. Negara-negara ASEAN juga mencoba meredakan ketegangan dengan berbicara dan menawarkan penyelesaian damai. Namun, konflik masih berlanjut hingga saat ini.

Klaim Wilayah dan Pergesekan Kepentingan

Sejak tahun 1947, Tiongkok mengklaim bahwa ia memiliki sebagian besar Laut Tiongkok Selatan

berdasarkan peta yang menunjukkan sembilan garis panjang. Klaim ini mencakup wilayah yang luas yang mungkin kaya akan sumber daya alam, seperti gas dan minyak. Berdasarkan hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), negara lain seperti Vietnam dan Filipina juga memiliki hak hukum atas wilayah tersebut. Setelah Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, Beijing tetap mempertahankannya. Klaim sepihak ini menimbulkan ketegangan antara pengklaim negara-negara, serta menarik perhatian negara-negara besar seperti AS. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini membuat situasi menjadi lebih kompleks karena AS membantu negara-negara yang menuntut hak atas wilayah tersebut dan melawan agresi Tiongkok. Kepentingan yang berubah dalam konflik ini sangat jelas. Di satu sisi, Tiongkok membangun infrastruktur militer di pulau-pulau yang disengketakan, seperti Kepulauan Spratly dan Paracel, untuk memperkuat posisinya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga kontrol atas jalur strategi perdagangan dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Negara-

negara ASEAN yang lebih kecil, di sisi lain, berusaha mempertahankan otonomi dan hak-hak ekonomi di wilayah yang mereka klaim. Negara-negara seperti Vietnam dan Filipina telah berulang kali menentang tindakan agresif Tiongkok, termasuk penangkapan nelayan dan penghalang eksplorasi sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. Misalnya, kapal penjaga pantai China baru-baru ini melakukan patroli intrusif di dekat blok eksplorasi minyak Vietnam di Vanguard Bank, menunjukkan bahwa, meskipun ada keputusan hukum internasional yang mendukung klaim negara-negara tersebut, klaim Tiongkok tetap tidak dapat diterima.

Ketegangan Militer dan Ancaman Keamanan Regional

Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu isu paling mendesak dalam geopolitik Asia Tenggara, memicu ketegangan militer dan ancaman terhadap keamanan regional. Militarisasi Wilayah: Beberapa negara, terutama China, telah memperkuat kehadiran militernya dengan membangun pangkalan militer di pulau-pulau yang disengketakan seperti Spratly dan Paracel. Tindakan ini tidak hanya menciptakan

ketegangan antara negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Sebagai respons, Indonesia telah memperkuat pertahanan di Natuna, sebuah wilayah yang strategis dan berdekatan dengan area konflik tersebut.

Risiko eskalasi konflik di Laut Cina Selatan meningkat seiring dengan meningkatnya insiden-insiden keamanan. Contohnya, pertemuan antara kapal perang dari berbagai negara, pelanggaran ruang udara, dan bentrokan di laut sering kali terjadi. Insiden terbaru melibatkan tabrakan antara kapal penjaga pantai Filipina dan China, yang menunjukkan betapa dekatnya situasi ini dengan potensi konfrontasi militer yang lebih luas. Ketegangan ini dapat memicu reaksi militer dari negara-negara yang terlibat, menciptakan siklus konflik yang sulit dihentikan. Konflik di Laut Cina Selatan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar ketegangan regional. Ketidakstabilan di kawasan ini dapat mengganggu alur pelayaran global, mengingat bahwa Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia, dengan nilai perdagangan mencapai triliunan dolar

setiap tahunnya. Selain itu, potensi konfrontasi militer dapat memicu keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia, yang memiliki perjanjian pertahanan dengan beberapa negara Asia Tenggara.

Ketegangan ini juga berdampak pada hubungan diplomatik antarnegara. Negara-negara yang terlibat dalam konflik sering kali terjebak dalam retorika agresif dan saling tuduh, yang dapat memperburuk situasi dan menghalangi upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam konteks ini, penting bagi ASEAN dan negara-negara mitra untuk memperkuat kerjasama regional guna mengatasi ketegangan dan mendorong dialog untuk menciptakan stabilitas di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, konflik di Laut Cina Selatan bukan hanya masalah lokal tetapi juga tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga keamanan maritim serta stabilitas politik di kawasan Asia-Pasifik.

Implikasi Ekonomi dan Perdagangan

Perdagangan internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas perekonomian suatu negara, terutama dalam konteks sumber daya alam, jalur strategi perdagangan, dan dampak ekonomi yang lebih luas. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi aspek ketiga tersebut dengan lebih mendalam.

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan komponen penting dalam perdagangan global. Indonesia dan negara lain dengan banyak sumber daya alam memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara mereka melalui ekspor. Misalnya, Indonesia terkenal sebagai penghasil mineral, batu bara, minyak kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Negara-negara dapat meningkatkan perencanaan dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar global dengan memanfaatkan sumber daya alam ini secara efektif. Namun eksploitasi sumber daya alam juga memiliki beberapa masalah. Misalnya, penurunan harga minyak atau komoditas lainnya dapat berdampak langsung pada pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat, membuat perekonomian rentan terhadap

perubahan harga di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif dari ketergantungan, negara harus mengelola sumber daya alam dengan bijak dan investor dalam diversifikasi ekonomi.

2. Jalur Perdagangan Strategis

Salah satu cara penting untuk menghubungkan pasar internasional adalah melalui jalur perdagangan strategis. Indonesia memiliki banyak keuntungan geografis karena berada di persimpangan jalur perdagangan Asia dan Pasifik. Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan jalur perdagangan global yang penting. Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, memungkinkan perjalanan cepat antara Asia dan Eropa dan berfungsi sebagai penghubung penting bagi negara-negara di kawasan Pasifik. Infrastruktur yang efisien seperti pelabuhan dan jalan raya sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi biaya logistik. Pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Belawan di Medan, telah menjadi pintu gerbang penting bagi barang masuk dan keluar dari Indonesia. Dengan investasi yang

tepat dalam infrastruktur pelabuhan, waktu bongkar muat dapat dipercepat dan biaya transportasi dapat ditekan, meningkatkan perdagangan domestik dan internasional. Selain itu, pembangunan jaringan jalan raya yang baik meningkatkan kecepatan pengiriman barang di dalam negeri. Pengusaha dapat mengangkut barang mereka ke pasar dengan lebih mudah berkat jalur darat yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Infrastruktur yang memadai membuat produk lokal lebih mudah diakses oleh konsumen, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional

3. Implikasi Ekonomi

Perdagangan internasional memiliki dampak ekonomi yang luas dan kompleks. Perdagangan internasional dapat membantu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Misalnya, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produknya melalui akses ke teknologi baru dan praktik terbaik dari negara mitra dagang. Sebaliknya, ada risiko yang harus diperhatikan. Jika tidak ada kebijakan perlindungan yang tepat, persaingan dari produk impor

dapat mengancam industri domestik. Selain itu, ketidakstabilan pasar internasional dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan inflasi domestik jika nilai tukar berubah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa manfaat dari keinginan perdagangan internasional dapat dirasakan oleh semua orang, sangat penting bahwa kebijakan pemerintah mendukungnya.

Maka, efektivitas perdagangan ekonomi ini berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, optimalisasi jalur strategi perdagangan, serta penerapan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, negara dapat memanfaatkan potensi perdagangan internasional untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara sangat terganggu oleh konflik Laut Cina Selatan. Ketegangan meningkat karena perselisihan teritorial antara negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, serta klaim Tiongkok, yang dapat menyebabkan konflik militer terbuka. Selain itu, peningkatan militerisasi di kawasan ini, termasuk pembangunan fasilitas militer Tiongkok di pulau-pulau yang diklaimnya, meningkatkan

kekhawatiran akan eskalasi kekerasan. Kehadiran negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang meningkatkan kehadiran militernya juga berkontribusi pada pengurangan ketegangan. Strategi sebagai jalur perdagangan utama dunia, geopolitik Laut Cina Selatan membuat persaingan antara negara-negara besar semakin kompleks dan meredakan ketidakstabilan. Selain itu, diplomasi dilakukan melalui ASEAN, tetapi konflik ini sering menghambat kerja sama regional karena Tiongkok berusaha memperluas pengaruhnya.

Selain itu, konflik ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan, karena terhambatnya perdagangan dan investasi. Secara keseluruhan, konflik di Laut Cina Selatan meningkatkan ketegangan politik, meningkatkan ancaman keamanan, dan menghambat kerja sama regional di Asia Tenggara. Konflik di Laut Cina Selatan memiliki dampak yang signifikan di tingkat internasional dan di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara memiliki pendekatan unik untuk menangani konflik tersebut, tetapi konflik tersebut menimbulkan ketegangan di antara negara, meningkatkan hubungan internasional. Mereka dioperasikan karena alasan

sosial, ekonomi, dan politik di setiap negara. Peningkatan anggaran militer mempengaruhi hubungan militer-sipil, yang memungkinkan negara-negara bekerja sama dalam menanggapi konflik di wilayah yang memiliki peran berbeda.

Dampaknya terhadap militer terutama pada penguatan pengawasan untuk mengendalikan seluruh aktivitas pertahanan negara di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Dampaknya juga berdampak pada alutsista militer masing-masing negara di sektor udara dan laut. Dalam konteks internasional, ini mencakup pengaruh terhadap negara-negara maju seperti Amerika Serikat, yang terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan melalui organisasi internasional, serta negara-negara yang terkena dampak dari konflik tersebut. Selain itu, orang-orang yang tinggal dekat jalur konflik di Tiongkok Selatan juga terkena dampak. Terdapat kekhawatiran akan terjadinya konsekuensi yang mengerikan, seperti nelayan terpaksa meninggalkan wilayah, jika nelayan di ZEE bertemu dengan patroli militer dari negara lain yang memasuki wilayah untuk berperang. Namun, hal ini belum jelas. Termasuk masuknya kapal ikan dari negara lain ke perbatasan mereka

karena peraturan yang tidak jelas, serta masalah dengan Tiongkok yang mengirimkan kapal ikan dengan pengawasan kapal perang ke wilayah Indonesia.

Dampak Terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Regional

Karena konflik ini kontroversial, pengaruh ini menghubungkan militer dengan warga sipil. Dalam hal ini, warga sipil berfungsi sebagai perwakilan negara, dan militer berfungsi sebagai alat negara. Konflik di Laut Cina Selatan memengaruhi keamanan regional dan global. Adapun beberapa efeknya yaitu, Ketegangan Regional: Ketegangan meningkat di antara negara-negara yang terlibat di Laut Cina Selatan, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, karena konflik wilayah ini dapat menyebabkan insiden militer yang tidak diinginkan dan meningkatkan risiko konflik bersenjata di wilayah tersebut. Gangguan Lalu Lintas Maritim: Ketegangan di Laut Cina Selatan dapat mengganggu lalu lintas maritim internasional, terutama karena kawasan ini merupakan jalur utama perdagangan internasional.

Gangguan ini dapat mengganggu stabilitas regional dan perekonomian global. Pengaruh

Eksternal: Konflik di Laut Cina Selatan telah mengganggu Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Intervensi luar negeri ini dapat memperumit keadaan dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Kegembiraan Politik: Persaingan di Laut Cina Selatan atas wilayah dan sumber daya meningkatkan politik regional. Ini dapat menghambat kerja sama regional dan upaya penyelesaian konflik secara damai. Ancaman Lingkungan: Konflik di Laut Cina Selatan juga dapat berdampak buruk pada lingkungan laut, seperti kerusakan terumbu karang dan hilangnya keanekaragaman hayati karena eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas militer. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara terkait untuk mencegah konflik lebih lanjut dan menjamin keamanan regional dan global.

Peran Organisasi Regional dalam Upaya Penyelesaian Konflik

Peran organisasi regional dalam upaya penyelesaian konflik ini dapat kita lihat melalui peran organisasi Internasional, yaitu ASEAN. ASEAN merupakan kumpulan negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN sangat membantu dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Beberapa negara, termasuk

Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan, memiliki klaim tumpang tindih di kawasan ini, yang membuatnya menjadi perhatian internasional. Konflik ini mempengaruhi stabilitas regional dan jalur perdagangan global yang penting. Laut Cina Selatan terkenal kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas, dan merupakan jalur pelayaran utama di seluruh dunia. Kawasan ini telah lama menjadi subjek persaingan kekuasaan antara pengklaim negara-negara. Ketegangan muncul dengan negara-negara ASEAN lainnya yang juga memiliki klaim legal atas wilayah Laut Tiongkok Selatan karena Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut melalui peta Nine-Dash Line. ASEAN juga mendukung penyelesaian secara multilateral. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam lebih suka menangani tuntutan mereka terhadap Tiongkok melalui forum multilateral. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan cara diplomasi, mediasi dan kerja sama. Dalam hal ini, ASEAN berfungsi sebagai mediator untuk mencari solusi perdamaian, memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak yang bersengketa dan juga membantu negara-negara yang

menuntut dan Tiongkok berbicara satu sama lain. Dibandingkan dengan negosiasi bilateral yang seringkali tidak efektif, metode ini memungkinkan adanya pertukaran pandangan dan penyelesaian yang lebih luas.

Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan ASEAN untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan, masalah tetap ada. Penipuan ekonomi dan politik di daerah merupakan masalah terbesar. Tindakan militer atau klaim sepihak dari satu pihak sering menyebabkan ketegangan antara Tiongkok dan negara lain meningkat. Selain itu, keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dalam masalah ini memperumit konflik dan menyelesaikan penyelesaian. Negara-negara anggota ASEAN memiliki cara dan kepentingan yang berbeda untuk menangani konflik ini. Meskipun ASEAN telah berusaha keras untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, masalah utama masih ada. Klaim sepihak dan tindakan militer yang sering dilakukan oleh Tiongkok serta keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat seringkali menghasilkan penyelesaian. Selain itu,

terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan di antara negara-negara ASEAN. Beberapa negara anggota, seperti Filipina dan Vietnam, cenderung memilih penyelesaian yang lebih tegas melalui forum internasional, sementara negara lain mungkin menginginkan penyelesaian yang lebih halus. Ketegangan di Laut Cina Selatan terus berlanjut meskipun berbagai upaya diplomasi telah dilakukan. Meskipun ASEAN telah berfungsi sebagai mediator yang mendorong perundingan dan kerjasama, penyelesaian yang permanen masih memerlukan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara yang mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) karena tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti pelanggaran terhadap keterlibatan negara-negara zona ekonomi eksklusif dan pembangunan infrastruktur militer Tiongkok di kawasan tersebut.

D. KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat area yang terletak di antara beberapa negara di wilayah ini, khususnya berkaitan klaim China tentang sebagian besar area dengan garis sembilan titik, menuju pada tingkat ketegangan yang tinggi. Sejak

Perang Dunia Kedua berakhir Kedua, pernyataan ini telah menghasilkan konflik antara negara-negara yang mengklaim pulau-pulau di Laut Cina Selatan, yang mencakup Vietnam, Malaysia, Filipina, China dan Brunei. masalah ini Dengan adanya menggunakan sumber daya alam di region, terutama gas dan minyak, yang mendorong persaingan konstruksi infrastruktur militer oleh negara-negara anggota. Keputusan yang dicapai oleh Pengadilan Arbitrase Dunia pada tahun 2016 yang menolak pernyataan Tiongkok, tidak mengurangi ketegangan, bahkan negara-negara besar yang serupa Amerika Serikat juga berpartisipasi. untuk membantu negara-negara yang mempertahankan wilayah tersebut dan menolak tindakan agresif Tiongkok.

Militerisasi daerah tersebut, seperti pembangunan infrastruktur militer pulau-pulau yang dimiliki oleh Tiongkok disengketakan, telah menjadi lebih buruk konflik di seluruh wilayah. Ini juga mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi jalur bisnis internasional yang signifikan, dan meningkatkan risiko terhadap keamanan dunia. Sumber daya sumber daya alam yang luas dan jalur pelayaran yang dirancang dengan baik

mengubah Laut Cina Selatan menjadi sebagai lingkungan yang sangat penting, demi kepentingan keduanya ekonomi dan geopolitik. usaha diplomatik, sebagian besar melalui ASEAN, berpartisipasi dalam upaya meringankan konflik, meskipun variasi tingkat kepentingan dari negara anggota dan keterlibatan negara-negara besar menyebabkan Penyelesaian yang damai masih menjadi tantangan. tercapai. Keberlanjutan konflik Ini mungkin meningkatkan bahaya bagi stabilitas politik dan ekonomi lokal, bahkan membahayakan keamanan maritim dan hubungan global. Secara umum, konflik laut Cina Selatan tidak hanya terkena dampak pada negara-negara anggota, tetapi mempengaruhi dinamika global dan ekonomi internasional, dengan implikasi dan perdamaian kawasan Asia Tenggara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia penulis dapat menyelesaikan artikel ini, kepada Bapak Prayetno, S.I.P., M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Internasional penulis ucapkan terimakasih. Kepada kedua

orang tua juga yang telah membantu mendoakan dalam penulisan artikel ini, dan penulis juga ucapkan terimakasih banyak kepada rekan-rekan yang telah berjuang bersama di dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Avrilia, P. R., & Aliabbas, A. (2024). DAMPAK AGRESIVITAS CHINA DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ASEAN. In *Jurnal Prisma Hukum* (Vol. 8, Issue 7).
- David Uren. (n.d.). *Conflict in the South China Sea: Analysing the Economic Toll*. Retrieved November 21, 2024, from

- <https://www.visionofhumanity.org/conflict-in-the-south-china-sea-analysing-the-economic-toll/>
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., Asikin, Z., Laut, S., Selatan, C., Realis, A., Kekuasaan, P., Regional, R., Geopolitik, D. I., Analisis, :, Terhadap, R., Implikasi, D., Agus, G., & Hidayat, R. (2024). *Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik*. 5(2), p-ISSN.
- Ilmu Sosial, J., Dan Humaniora, P., Djuyandi, Y., Qaia Illahi, A., Corah Habsyah Aurel, A., Raya Bandung Sumedang, J. K., Jatinangor, K., Sumedang, K., & Barat, J. (2021). Konflik Laut China Selatan Serta Dampaknya Atas Hubungan Sipil Militer di Asia Tenggara. *Adinda Corah Habsyah Aurel*, 5(1). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Inggra Parandaru. (2024, April 17). *Sengketa Laut China Selatan dan Ancaman Kedaulatan Indonesia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengketa-laut-china-selatan-danancaman-kedaulatan-indonesia>
- Politik, B., Keamanan, D., Analisis Keparlemenan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR Badan Keahlian DPR RI Gd Nusantara I Lt, P. R., Nusantara Lt, G. I., & Jend Gatot Subroto JI Jend Gatot Subroto, J. (2023). *KETEGANGAN FILIPINA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN SERTA UPAYA ASEAN DALAM MENGATASINYA*.
- Rizqy, M., Putra, S., Christian, R., Chandra, J. B., & Kenneth, N. (2024). Dampak Konflik Sengketa Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Hukum Internasional. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2).
- suraya. (2018). *PENGARUH KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TERHADAP HUBUNGAN PERDAGANGAN KOREA SELATAN-CHINA*.
- Suyud Puguh Sunoto, A. A. F. N. (2023). Dampak Sekuritisasi Konflik Laut Cina Selatan terhadap Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10084>
- Wira Pambudi, A. (2019). *ANALISA RESPON INDONESIA TERHADAP MILITERISASI TIONGKOK DI LAUT CHINA SELATAN MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO 2014-2019* (Vol. 2, Issue 2).